



## Strategi Intervensi TNI Dalam Pendidikan Di Perbatasan

Nevra Firdaus<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Elektronika Sistem Senjata, Politeknik Angkatan Darat, Malang, Indonesia.

### Article Info

Received: February 01, 2025

Revised: February 25, 2025

Accepted: March 15, 2025

Published: April 17, 2025

Correspondence:

Nevra Firdaus

[nefrafirdaus@poltekad.ac.id](mailto:nefrafirdaus@poltekad.ac.id)

**Abstract:** Pendidikan di wilayah perbatasan merupakan tantangan tersendiri akibat keterbatasan infrastruktur, tenaga pendidik, dan akses terhadap sumber belajar. Dalam menghadapi permasalahan ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan aktif melalui berbagai strategi intervensi guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi intervensi TNI dalam sektor pendidikan, baik melalui program pengajaran, penyediaan fasilitas, hingga pendampingan sosial bagi masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi intervensi TNI dalam pendidikan di perbatasan meliputi peran sebagai tenaga pengajar sementara, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta pemberian bimbingan moral dan kebangsaan bagi siswa. Selain itu, TNI juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Strategi intervensi TNI dalam pendidikan di perbatasan memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di wilayah terpencil. Diperlukan kebijakan yang lebih terstruktur serta sinergi yang lebih erat antara TNI, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan serta efektivitas program yang telah berjalan.

**Keywords:** Strategi Intervensi, TNI, Pendidikan, Perbatasan, Pembangunan Sumber Daya Manusia.

### Introduction

Pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara dan menjadi fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa *"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,"* (UUD, 1945) dan ayat (3) menyebutkan bahwa *"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia."* (UU, 1945) Pernyataan tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk memastikan setiap warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata.

Namun, realitas di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah perbatasan, menunjukkan bahwa hak atas pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi. Wilayah perbatasan Indonesia umumnya merupakan kawasan yang berada jauh dari pusat pemerintahan, sulit diakses secara geografis, dan tertinggal secara sosial-ekonomi. Keterbatasan infrastruktur dasar, minimnya fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pengajar, serta akses transportasi yang terbatas menyebabkan rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah-daerah ini (Kemendikbudristek, 2023). Data dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menunjukkan bahwa dari lebih dari 222 kecamatan perbatasan di Indonesia, sebagian besar mengalami ketertinggalan dalam indikator pendidikan dasar dan menengah (BNPP, 2022).

Wilayah perbatasan sejatinya tidak hanya dilihat sebagai batas administratif dan geografis, tetapi juga sebagai wajah depan negara. Oleh karena itu, pembangunan di kawasan ini harus menjadi prioritas strategis, bukan hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga sosial dan pertahanan. Ketimpangan dalam akses pendidikan

dapat menjadi celah yang membahayakan integrasi nasional, memperlemah rasa kebangsaan, serta membuka ruang bagi pengaruh budaya asing atau bahkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila (Azra, 2015).

Untuk menjawab persoalan-persoalan di wilayah perbatasan, pemerintah telah melibatkan berbagai lembaga, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam kerangka tugasnya, TNI tidak hanya bertanggung jawab atas pertahanan negara dari ancaman militer, tetapi juga memiliki mandat dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yaitu membantu tugas pemerintah di daerah (UU, 2004). Salah satu bentuk konkret dari OMSP adalah keterlibatan TNI dalam pembangunan pendidikan di daerah perbatasan.

Intervensi TNI dalam dunia pendidikan mencerminkan pendekatan teritorial yang bersifat menyeluruh dan berbasis pengabdian kepada rakyat. Strategi ini dilakukan melalui pengiriman personel untuk mengajar di sekolah yang kekurangan guru, membantu pembangunan atau perbaikan fasilitas pendidikan, menyelenggarakan program non-formal seperti penyuluhan kebangsaan, serta membina kedekatan sosial dengan masyarakat lokal (Nursamsu, 2020). Contoh nyata dapat ditemukan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dan Papua, di mana personel Satgas Pamtas (Pengamanan Perbatasan) TNI menjadi guru sukarelawan untuk siswa-siswa di daerah terpencil (Kodam XVII, 2023).

Keberadaan TNI sebagai aktor non-sipil dalam sektor pendidikan pada dasarnya merupakan respons atas ketidakhadiran atau belum optimalnya peran lembaga sipil. Dalam situasi darurat, seperti tidak adanya guru di sekolah, TNI sering kali menjadi satu-satunya harapan bagi keberlangsungan proses belajar-mengajar (Republika, 2023). Lebih dari itu, TNI juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter nasionalisme generasi muda perbatasan melalui pendekatan edukatif yang disertai nilai-nilai bela negara.

Meski demikian, pelaksanaan strategi intervensi TNI ini tidak lepas dari sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan kompetensi pedagogis prajurit, potensi tumpang tindih dengan peran instansi pendidikan, serta aspek legal-formal yang harus disesuaikan dengan prinsip civil supremacy dalam demokrasi (Sukma, 2004). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian akademik secara mendalam mengenai strategi intervensi ini, termasuk tinjauan terhadap efektivitas, keberlanjutan, serta dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat dan sistem pendidikan nasional.

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan utama: bagaimana bentuk, pola, dan efektivitas strategi intervensi TNI dalam pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia? Dengan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan lintas sektor antara pertahanan dan pendidikan, sekaligus memperkaya literatur akademik mengenai hubungan sipil-militer dalam konteks pembangunan.

## Method

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan metode *studi kasus*. Studi kasus dipilih untuk memahami secara mendalam strategi intervensi yang dilakukan oleh TNI dalam sektor pendidikan di wilayah perbatasan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai aspek kebijakan, implementasi, dan dampak intervensi secara holistik.

### 2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah perbatasan Indonesia, yang meliputi perbatasan darat dan maritim. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan TNI dalam mendukung pendidikan di daerah tersebut. Subjek penelitian mencakup:

- *Personel TNI* yang terlibat dalam program pendidikan,
- *Guru dan tenaga pendidik* yang berkolaborasi dengan TNI,
- *Siswa dan orang tua* di daerah perbatasan,
- *Pejabat pemerintahan daerah* terkait kebijakan pendidikan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu:

- *Wawancara Mendalam*: Dilakukan terhadap personel TNI, tenaga pendidik, siswa, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi tentang strategi intervensi TNI dalam pendidikan
- *Observasi Partisipatif*: Peneliti akan mengamati secara langsung kegiatan pendidikan yang melibatkan TNI, termasuk metode pengajaran, fasilitas yang digunakan, dan interaksi antara TNI dengan siswa serta guru.
- *Studi Dokumentasi*: Mengkaji dokumen kebijakan, laporan program pendidikan, dan data statistik terkait pendidikan di wilayah perbatasan.

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode *analisis tematik*, yang meliputi:

- A. *Reduksi Data*: Menyeleksi dan mengorganisir data yang relevan dengan fokus penelitian.

- B. *Kategorisasi dan Koding*: Mengelompokkan data berdasarkan tema yang muncul dalam wawancara, observasi, dan dokumen.
- C. *Penarikan Kesimpulan*: Menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memahami pola intervensi yang dilakukan oleh TNI dalam pendidikan.

### 5. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan *triangulasi sumber dan metode*, yang melibatkan:

- *Triangulasi Sumber*: Membandingkan informasi dari berbagai informan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.
- *Triangulasi Metode*: Menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk memvalidasi hasil temuan.
- *Member Checking*: Meminta konfirmasi dari informan mengenai hasil wawancara untuk memastikan keakuratan data.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi intervensi TNI dalam pendidikan di perbatasan serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan di daerah tersebut

## Result

### Hasil Analisis Strategi Intervensi TNI

#### Strategi Intervensi TNI dalam Pendidikan di Perbatasan

Intervensi TNI dalam pendidikan di daerah perbatasan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan, memfasilitasi pembelajaran, dan membangun rasa aman di daerah yang seringkali terisolasi. Berdasarkan data yang terkumpul, intervensi TNI dalam sektor pendidikan mencakup beberapa program utama (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2020):

**Tabel 1. Strategi Intervensi TNI dalam Pendidikan di Perbatasan**

No	Strategi Intervensi	Deskripsi
1	Pendidikan Non-Formal & Keterampilan	Pelatihan kewirausahaan, kursus teknis dan vokasional bagi masyarakat lokal (BNPP, 2021)
2	Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	Renovasi/pembangunan sekolah, ruang kelas, asrama, dan fasilitas pendukung (Departemen Pendidikan Nasional, 2009)
3	Penyediaan Guru dari Prajurit TNI	Penugasan prajurit terlatih untuk mengajar di sekolah-sekolah perbatasan (Kemhan, 2020)
4	Kemitraan Lintas Sektor	Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk dukungan (Mulyasa, 2013)

#### a. Pendidikan Non-Formal dan Keterampilan

TNI telah menyelenggarakan program pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat di perbatasan. Program ini bertujuan untuk mengatasi rendahnya tingkat pendidikan formal serta memberikan keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Kegiatan ini berupa pelatihan kewirausahaan, keterampilan teknis, dan kursus kejuruan yang diselenggarakan oleh TNI di pos-pos perbatasan (Pusat Teritorial TNI AD, 2019).

#### b. Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

Salah satu langkah yang diambil oleh TNI adalah pembangunan dan renovasi sarana pendidikan, termasuk sekolah dan asrama. Hal ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah perbatasan. Berdasarkan temuan lapangan, beberapa sekolah di daerah perbatasan mengalami perbaikan fasilitas, seperti pembangunan ruang kelas, laboratorium, dan penyediaan peralatan belajar (BPS, 2021).

#### c. Penyediaan Guru dan Tenaga Pengajar

Keterbatasan jumlah tenaga pendidik di daerah perbatasan merupakan masalah yang signifikan. Sebagai bagian dari strategi intervensi, TNI mengirimkan prajurit yang terlatih sebagai guru untuk mengajar di sekolah-sekolah perbatasan. Meskipun sebagian besar prajurit tidak memiliki latar belakang pendidikan formal, mereka menjalani pelatihan pendidikan dasar agar dapat mengajar dengan efektif (Nurhadi, 2020).

#### d. Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Pemerintah

Selain melakukan intervensi langsung, TNI juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan lainnya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif di perbatasan. Ini mencakup penyediaan bahan ajar, pengiriman tenaga pengajar, serta mendukung

### Dampak Intervensi TNI terhadap Pendidikan di Perbatasan

Dampak dari intervensi TNI dalam sektor pendidikan di daerah perbatasan dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan penguatan ketahanan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan masyarakat setempat, berikut adalah beberapa dampak yang ditemukan:

**Tabel 2. Dampak Intervensi TNI terhadap Pendidikan di Perbatasan**

No	Aspek Dampak	Penjelasan
1	Akses Pendidikan	Meningkatnya jumlah anak yang bisa bersekolah di wilayah perbatasan ( Nurhasanah dkk, 2020)
2	Kualitas Pembelajaran	Pembelajaran lebih terstruktur meski belum optimal; adanya pelatihan untuk prajurit pengajar (Prasetyo, 2018)
3	Ketahanan Sosial	Penanaman nilai-nilai nasionalisme, persatuan, dan cinta tanah air melalui pendidikan (Subekti, 2022)

#### a. Peningkatan Akses Pendidikan

Intervensi TNI dalam menyediakan fasilitas pendidikan telah memungkinkan lebih banyak anak-anak di daerah perbatasan untuk mengakses pendidikan. Sekolah-sekolah yang semula tidak memiliki fasilitas yang memadai kini dapat memberikan pendidikan yang lebih baik, dengan adanya ruang kelas yang layak dan peralatan yang cukup. Keberadaan pos-pos TNI di wilayah perbatasan juga memberikan rasa aman bagi orang tua untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah (Tokoh Masyarakat).

#### b. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Program pelatihan keterampilan yang diadakan oleh TNI membantu masyarakat memperoleh keahlian yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, keberadaan tenaga pengajar dari TNI juga memberikan kontribusi positif meskipun terbatas oleh pengalaman pendidikan formal. Di beberapa tempat, pelatihan dan penyuluhan mengenai teknik mengajar kepada anggota TNI yang ditugaskan di perbatasan telah meningkatkan efektivitas pengajaran.

#### c. Penguatan Ketahanan Sosial

Pendidikan yang diberikan oleh TNI tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Hal ini berperan penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat di daerah perbatasan, terutama yang terpapar pada isu-isu keamanan dan ketegangan sosial (Susanto, 2021).

**Tabel 3. Tantangan dalam Implementasi Strategi TNI**

Meskipun intervensi TNI dalam pendidikan di daerah perbatasan memiliki dampak positif, beberapa tantangan signifikan masih dihadapi dalam implementasinya:

**Tabel 3. Tantanga dalam Implementasi Strategi TNI**

No	Tantangan	Deskripsi
1	Sumber Daya Manusia Terbatas	Keterbatasan prajurit yang memiliki kemampuan pedagogis dan latar belakang pendidikan (Susanto, 2017)
2	Fasilitas Minim	Kurangnya sarana seperti buku, komputer, internet di sekolah-sekolah perbatasan (TNI, 2021)
3	Akses & Logistik	Hambatan geografis dan transportasi yang sulit menjangkau lokasi-lokasi terpencil (Winarno, 2021)

#### a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan jumlah tenaga pengajar yang memenuhi syarat. Meskipun prajurit TNI yang dikirim ke daerah perbatasan memiliki semangat yang tinggi, mereka seringkali tidak memiliki keterampilan mengajar yang cukup. Hal ini mempengaruhi kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah yang mereka kelola.

#### b. Keterbatasan Fasilitas

Meskipun ada peningkatan fasilitas, beberapa daerah perbatasan yang terletak di lokasi terpencil masih

mengalami kekurangan dalam hal akses terhadap teknologi pendidikan, seperti komputer dan internet. Ini menghambat pembelajaran yang lebih modern dan mengurangi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa (Bappenas, 2022).

### c. Kendala Logistik dan Aksesibilitas

Tantangan geografis yang berat dan sulitnya akses ke daerah-daerah perbatasan sering kali menghambat distribusi materi pendidikan dan kehadiran pengajar secara rutin. Daerah perbatasan yang terisolasi sering kali terhambat oleh keterbatasan transportasi dan cuaca ekstrem (BNPB, 2023).

### Rekomendasi Penguatan Intervensi

Untuk memperbaiki dan meningkatkan keberhasilan strategi intervensi TNI dalam pendidikan di perbatasan, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah:

**Tabel 4. Rekomendasi Penguatan Intervensi**

No	Rekomendasi	Penjelasan
1	Pelatihan Prajurit sebagai Pengajar	Melibatkan pelatihan pedagogis dan teknologi pembelajaran.
2	Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor	Kerjasama dengan Dinas Pendidikan, NGO, dan institusi pendidikan tinggi.
3	Pengadaan Sarana & Transportasi	Pengiriman alat belajar, pembangunan jalan akses ke lokasi perbatasan.

Peningkatan pelatihan untuk prajurit yang ditugaskan di sektor pendidikan, baik dalam hal pedagogi maupun penggunaan teknologi pendidikan. Penguatan kerjasama antara TNI, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan untuk memastikan keberlanjutan program pendidikan di perbatasan (Kemendikbud, 2021). Penyediaan fasilitas yang lebih baik, terutama dalam hal teknologi pendidikan dan transportasi untuk memudahkan akses ke daerah terpencil (Komnas Ham, 2020).

### Discussion

Strategi intervensi TNI dalam pendidikan di wilayah perbatasan merupakan bentuk keterlibatan militer dalam fungsi non-kombatan yang bersifat sosial dan edukatif. Hal ini merupakan bagian dari pendekatan *Military Operations Other Than War (MOOTW)* yang diterapkan dalam konteks keamanan dan pembangunan nasional (TNI, 2020). Di Indonesia, peran ini menjadi penting mengingat banyak wilayah perbatasan yang masih tergolong tertinggal dan kurang mendapat perhatian dari sektor formal (BNPP, 2021).

Kehadiran TNI sebagai pengajar darurat dan fasilitator pendidikan di daerah perbatasan menjadi solusi atas kekurangan guru dan minimnya infrastruktur pendidikan. Ini menunjukkan bahwa TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga memainkan peran sosial yang vital. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (UURI, 2004).

TNI berhasil membangun hubungan emosional dengan masyarakat setempat melalui pendekatan budaya, dialog, dan empati. Pendekatan ini menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, yang pada akhirnya mendorong peningkatan partisipasi pendidikan (Wahyuni, 2019). Interaksi positif ini juga memperkuat rasa nasionalisme dan keberpihakan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Suyanto, 2016).

Salah satu kekuatan intervensi TNI adalah kemampuannya menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Melalui koordinasi dengan instansi pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat, TNI mampu memperluas cakupan program tanpa bekerja sendirian (Nuryanto, 2020). Sinergi ini penting untuk menghindari tumpang tindih program dan memaksimalkan sumber daya yang ada (Kemendikbud, 2020).

Keterlibatan TNI dalam aktivitas sekolah membawa dampak positif terhadap karakter siswa. Nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan cinta tanah air menjadi bagian dari pembelajaran yang ditanamkan secara langsung oleh para prajurit (Simanjuntak, 2022). Ini menjadi kontribusi penting dalam pembentukan generasi muda yang tangguh, terutama di daerah yang rawan terhadap pengaruh negatif dari luar (Taufik, 2018).

Keberhasilan strategi ini harus dijadikan pijakan untuk merancang program jangka panjang yang lebih



sistematis. TNI sebaiknya difungsikan sebagai pelopor dan pendukung, bukan menggantikan peran guru secara permanen. Dalam jangka panjang, fokus utama tetap pada peningkatan kapasitas daerah untuk mandiri dalam menyediakan layanan pendidikan (Kemhan, 2015).

## Conclusion

Strategi intervensi TNI dalam pendidikan di perbatasan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan yang sering mengalami keterbatasan akses pendidikan. TNI berperan sebagai fasilitator, pendidik, serta penggerak dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi masyarakat perbatasan. Melalui program seperti pengajaran langsung, pembangunan fasilitas sekolah, serta pemberian bantuan pendidikan, TNI membantu mengatasi permasalahan seperti minimnya tenaga pengajar, kurangnya infrastruktur, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Pendekatan ini juga memperkuat rasa nasionalisme, menanamkan disiplin, serta mempererat hubungan antara masyarakat dengan negara. Namun, keberlanjutan intervensi ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat setempat. Sinergi yang baik antara TNI dan stakeholder lainnya akan memastikan bahwa pendidikan di wilayah perbatasan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi generasi mendatang.

## Acknowledgements

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat.

## References

- Azra, A. (2015). *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*. Jakarta: Prenadamedia.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). (2020). "Evaluasi Program Pendidikan di Wilayah Perbatasan." Jakarta: BNPP RI.
- Azra, A. (2015). *Pendidikan Islam dan tantangan modernitas*. Prenadamedia.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2020). *Evaluasi program pendidikan di wilayah perbatasan*. BNPP RI.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2021). *Laporan tahunan BNPP: Pengelolaan kawasan perbatasan*. BNPP.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2021). *Laporan tahunan: Penguatan layanan dasar di perbatasan negara*. BNPP.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2022). *Laporan tahunan BNPP: Evaluasi pembangunan di wilayah perbatasan*. Sekretariat BNPP.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik pendidikan perbatasan Indonesia*.
- Bappenas. (2022). *Kajian infrastruktur pendidikan wilayah perbatasan*.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Pemetaan risiko dan aksesibilitas wilayah perbatasan*.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Pedoman umum program pendidikan di wilayah terpencil*. Depdiknas.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. (2020). *Laporan tahunan program pendidikan di perbatasan*. Kemendikbud.
- Hasil observasi lapangan di Kabupaten Nunukan. (2024).
- Kemendikbudristek. (2021). *Sinergi pendidikan perbatasan*.
- Kemendikbudristek. (2023). *Profil pendidikan nasional 2022*. Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Peta mutu pendidikan di wilayah perbatasan*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Peningkatan akses pendidikan di wilayah perbatasan*. Kemendikbud RI.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia*.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)*. Kemhan RI.
- Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih. (2023). *Laporan kinerja Satgas Pamtas RI-PNG*. Penerangan Kodam.
- Komnas HAM. (2020). *Pendidikan dan hak anak di wilayah terpencil*.
- Laporan Pelatihan Pendidikan Teritorial TNI, Pusat Pendidikan Teritorial TNI. (2023).
- MoU TNI-Pemda tentang Pendidikan Perbatasan. (2018).
- Mulyasa, E. (2013). *Menjadi guru profesional*. Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi, D. (2020). Pendidikan di wilayah terpencil: Kontribusi TNI. *Jurnal Ketahanan Nasional*.
- Nurhasanah, S., & Irawan, B. (2020). Peran TNI dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 45–58. <https://doi.org/10.22146/jkn.v26i1.55934>

- Nursamsu, H. (2020). Peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah 3T. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 155–172.
- Nuryanto, E. (2020). Kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(1).
- Prasetyo, B. (2020). *Peran TNI dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil*. Pustaka Bangsa.
- Prasetyo, H. (2018). Strategi penguatan pendidikan di daerah 3T. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23(2), 121–132.
- Pusat Teritorial TNI AD. (2019). *Peran TNI dalam pembinaan teritorial wilayah perbatasan*.
- Republika.co.id. (2023, Juli 4). Satgas TNI jadi guru di perbatasan. <https://www.republika.co.id>
- Rijal, M. K. (2019). *Peran TNI dalam meningkatkan pendidikan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)*. Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda.
- Simanjuntak, M. (2022). Penerapan nilai-nilai bela negara oleh TNI. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1).
- Subekti, R. (2022). *TNI dan peran sosial di wilayah perbatasan Indonesia*. Pustaka Militer Indonesia.
- Suharto, A. (2022). *Intervensi sosial TNI dalam pendidikan: Studi kasus di perbatasan Indonesia–Malaysia*. Gadjah Mada University Press.
- Sukma, R. (2004). *Paradigma baru hubungan sipil-militer di Indonesia*. CSIS Press.
- Suryadinata, L. (2019). *Pendidikan di wilayah perbatasan: Tantangan dan solusi kebijakan*. CV. Cendekia.
- Susanto, A. (2017). *Teori belajar & pembelajaran di sekolah dasar*. Kencana Prenada Media.
- Susanto, R. (2021). Pendidikan dan ketahanan sosial di perbatasan. *Jurnal Pertahanan*.
- Suyanto, B. (2016). *Pendidikan dan ketahanan sosial di daerah perbatasan*. Gadjah Mada University Press.
- Taufik, R. (2018). Strategi pembangunan pendidikan di wilayah 3T. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 25(3).
- Tentara Nasional Indonesia. (2020). *Pedoman OMSP*. Mabes TNI.
- Tentara Nasional Indonesia. (2021). *Buku saku operasi teritorial TNI*. Mabes TNI.
- TNI Manunggal Membangun Desa. (2022). *Laporan kegiatan pembangunan infrastruktur pendidikan di perbatasan*. TNI AD.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- Wahyuni, S. (2019). Peran Satgas Pamtas TNI dalam meningkatkan kualitas pendidikan. *Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2).
- Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 01 Entikong. (2024).
- Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Long Midang. (2024).
- Widodo, R. (2021). *Strategi pemberdayaan masyarakat oleh TNI di daerah perbatasan*. Lembaga Penelitian Nusantara.
- Winarno, S. (2021). Tantangan dan peluang pendidikan di perbatasan. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 5(3), 207–216.
- Yulianto, D. (2018). *Pembangunan infrastruktur pendidikan di perbatasan: Peran dan tantangan*. Universitas Brawijaya Press.